

Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan : Sebuah Survai Awal

Soegijanto Padmo

1. Pendahuluan

Gambaran klasik tentang pengaruh ekonomi perkebunan terhadap ekonomi dan masyarakat petani di sekitarnya di negara berkembang yang eksploitatif dan opresif sejak lama telah mewarnai pemikiran para peneliti yang tertarik dalam bidang tersebut. Andre Gunder Frank (1967) adalah penganjur dan tokoh dari pemikiran itu, kemudian muncul pemikir-pemikir lain, meskipun dengan berbagai variasi dalam memberikan penekanan, misalnya Laclau (1971) yang menekankan hubungan perburuhan di perusahaan perkebunan sebagai isu sentral dalam perekonomian kapitalis. Karya tentang ekonomi perkebunan yang menggunakan pendekatan serupa di Indonesia antara lain dilakukan oleh Ann Stoler (1985) yang melakukan penelitian di Sumatra Timur.

2. Penelitian tentang Ekonomi Perkebunan

Sejak dasawarsa 1960-an, ekonomi perkebunan di Hindia Belanda telah menarik perhatian para peneliti dari ilmu-ilmu sosial dan sejarawan. Mereka telah melakukan penelitian tentang berbagai aspek dari sektor yang unik dari sistem kolonial. Penelitian dari sarjana seperti Allen dan Donnithorne (1968) dan Barlow (1984) misalnya, telah mencoba membandingkan antara perkembangan perkebunan di Indonesia dan Malaya.

Peneliti lain seperti The Kian-wie (1977), Pelzer (1982) dan O'Malley (1977) telah menulis secara luas tentang perkembangan daerah yang merupakan wilayah perkebunan penting di Indonesia pada masa penjajahan yaitu Sumatra Timur. Perkebunan gula di Jawa telah diuraikan dengan singkat oleh Allen dan Donnithorne, yang kemudian dilanjutkan secara mendalam tentang reaksi kependudukan terhadap perkembangan perkebunan gula di Jawa oleh Geertz (1963). Peneliti lain yang melihat dinamika perubahan dengan pola yang berbeda yaitu Elson (1984) di Pasuruan, Knight (1983) di Pekalongan dan Fernando (1982) di Karesidenan Cirebon. Disadari bahwa suatu penulisan sejarah tanaman perkebunan penting seperti tebu yang komprehensif diperlukan namun hal itu belum dilakukan orang.

Penelitian Allen dan Donnithorne yang dilakukan pada awal 1950-an adalah satu dari sumbangan yang berharga bagi sejarah perusahaan Barat di Indonesia dan Malaya. Tujuan penelitian itu adalah menyelidiki arah perkembangan dari perusahaan barat di dalam lingkungan yang berbeda dengan menunjukkan keberhasilan mereka, perbedaan metode, organisasi dan kebijaksanaan dari perusahaan tersebut serta perbedaan dalam hubungan mereka dengan penduduk Asia dimana mereka bekerja sama. Satu dari kesimpulan yang paling menarik adalah bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas dari perusahaan tersebut

terhadap kondisi pasar, dimungkinkan oleh dukungan modal, merupakan faktor penting dalam keberhasilan mereka. Barlow membuat penelitian serupa tentang industri karet di dua negara 30 tahun kemudian, yang banyak dipengaruhi oleh teori dualisme dari Boeke. Ia mencoba mengkaji peranan sektor perkebunan rakyat dalam perkebunan karet untuk ekspor dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola perkembangan yang berbeda dari dua subsektor industri perkebunan karet di Indonesia dan Malaya yang menunjukkan kompleksitas dari respons dari situasi pasar yang berbeda dan perubahan teknologi dari masa ke masa.

Penelitian yang penting atas sumbu ekonomi perkebunan terhadap perkembangan regional adalah yang telah dikerjakan oleh The Kian-wie terhadap perkebunan tembakau, karet dan kelapa sawit di Sumatra Timur. Perkebunan itu adalah merupakan perusahaan dengan ciri-ciri yang sangat menonjol dalam hal skala usaha yang besar, sangat padat modal, bekerja dalam lingkungan sosial ekonomi dimana tanah melimpah tetapi tenaga kerja sangat jarang dan harus didatangkan dari daerah lain. Kebijakan upah buruh murah (*cheap labor policy*) dan larangan menggarap tanah perkebunan yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan di daerah ini menghambat munculnya produksi tanaman ekspor rakyat, terutama untuk tanaman tembakau. Dualisme dalam ekonomi perkebunan tampak di Sumatra Timur baik dalam aspek teknologi maupun sosial dan jauh lebih tajam dari apa yang dapat dijumpai di perkebunan gula di Jawa. The Kian-wie menemukan jurang yang memisahkan antara perkebunan karet raksasa milik perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat yang kecil dan lemah dalam ekonomi regional semakin lebar karena perusahaan perkebunan mampu memperluas tanah yang dikuasainya dan

meningkatkan teknologinya sedangkan petani perkebunan tak pernah beranjak dari teknologi tradisional dalam pengusahaan tanaman.

Karya Pelzer tentang Sumatra Timur memberikan gambaran yang lebih bulat tentang perkembangan hubungan agraris antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat. Pentingnya struktur sosial dan teknologi tradisional dalam jawaban yang diberikan petani setempat terhadap kesempatan muncul pada masa tertentu menjadi fokus perhatian Pelzer sejak 1940. Arah perkembangan dari perusahaan perkebunan di daerah ini telah digambarkan oleh Geertz sebagai: "...tak bisa dijumpai dimanapun di Indonesia, tak pula di Jawa Tengah, perusahaan perkebunan berkembang sedemikian pesat, dengan dukungan sumber yang cukup, dan sangat menguntungkan, tetapi juga sedemikian merusak." (Pelzer, 1982, pp. vii-xi.)

Tema itulah yang menjadi fokus perhatian Pelzer dalam bukunya yaitu *Planter and Peasant* dan *Planters Against Peasants*. Dalam buku yang pertama, Pelzer melacak perkembangan perkebunan di Sumatra Timur pada masa kolonial, sedangkan pada buku yang kedua, yang tak selesai sampai dengan saat ia meninggal dunia, adalah dimaksudkan sebagai kajian tentang sejarah ekonomi perkebunan pada akhir masa kolonial. Pelzer menguraikan berbagai perubahan yang terjadi selama kurun waktu yang dipelajari dimana terdapat satu aspek yang tak pernah terselesaikan: penggunaan tanah. Selama 75 tahun dari modernisasi agraria yang sedemikian intensif di Sumatra Timur menghasilkan satu dari konflik-konflik agraris pada jaman modern: ketersediaan tanah luas yang murah versus penggarap yang tak syah.

Penelitian terhadap perkebunan di Jawa pada tahun terakhir antara lain oleh Fasseur, Elson, Fernando dan Knight terhadap Sistem Tanam Paksa dan industri gula, terutama pada masa awal perkem-

bangannya. (Sedikit perhatian telah diberikan kepada berbagai tanaman pegunungan di Jawa seperti kopi, teh, karet, yang mempunyai dampak yang penting terhadap daerah timur Jawa Timur). Satu sumbangan terpenting dari penelitian mereka adalah bahwa mereka cenderung untuk mempertanyakan pemikiran lama bahwa "perusahaan perkebunan adalah sekedar satu beban baru yang diletakkan di pundak petani Jawa, sebagai tambahan dari pajak tanah, tanpa balas jasa yang cukup atas pekerjaan yang telah dilakukannya" (Fasseur, 1986, p. 150). Fasseur telah menekankan pentingnya sumbangan yang diberikan oleh upah dalam mengusahakan tanaman perdagangan itu (*plantoon*) terhadap daya beli dari daerah tertentu dan jumlah uang yang beredar selama Sistem Tanam Paksa, karena terdapat banyak bukti bahwa di daerah tertentu di Jawa, sekurangnya, Sistem Tanam Paksa "telah menaikkan tingkat kesejahteraan meskipun bukan tanpa kenaikan beban tenaga kerja pada penduduk Jawa". Interpretasi yang radikal terhadap dampak sosial ekonomis dari tanaman perkebunan, terutama gula, di bawah Sistem Tanam Paksa (STP) memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali asumsi lama bahwa dampak yang ditimbulkan semata-mata opresif dan eksploitatif. Tetapi itu tak pula berarti bahwa dampak sosial dari tanaman ini selalu menguntungkan penduduk setempat mengingat pada periode kemudian banyak daerah menjadi sedemikian tergantung pada tanaman perkebunan itu dan terperangkap (*locked in*) dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan tanah dan tenaga kerja, terutama pada masa Depresi. Lebih penting dari itu, Elson dan Knight telah menunjukkan bagaimana elit desa yang terdiri dari orang kaya di desa dan *pamong desa* bisa memperoleh keuntungan dari peran yang mereka mainkan sebagai perantara dan penyedia tenaga kerja antara pengusaha Belanda dan

penduduk desa. Dalam hal ini, analisa mereka terhadap dinamika sosial ekonomis dari industri gula berbeda dalam beberapa hal yang mendasar dengan apa yang dikemukakan oleh Geertz dalam *Agricultural Involution dengan penekanan pada "shared poverty" dan levelling effect* dari industri gula. Namun demikian Geertz adalah benar dalam mengingatkan kita semua bahwa adalah penting untuk menganalisa dampak dari tanaman yang berbeda dalam organisasi sosial dan perkembangan dari daerah yang berbeda lewat kebutuhan mereka akan tanah dan tenaga kerja terhadap berbagai kelompok dari masyarakat.

Dampak sosial ekonomis yang ditimbulkan oleh perusahaan perkebunan adalah diciptakannya kesempatan kerja baik dalam kegiatan produksi maupun prosesing. Ini adalah akibat langsung yang melibatkan petani pemilik tanah yang digunakan untuk mengusahakan tanaman perkebunan, khususnya tanaman semusim seperti tebu dan tembakau di Jawa, dan buruh yang direkrut dari daerah sekitarnya. Bagi tanaman tahunan seperti teh, kopi dan karet misalnya yang menyewa tanah luas dan yang merekrut tenaga kerja dari penduduk sekitar atau mendatangnya dari daerah lain akan mempunyai hubungan kerja dan organisasi produksi yang berbeda. Kecuali itu, siklus kegiatan selama satu tahun mempengaruhi pula organisasi produksi. Tanaman semusim akan mempunyai organisasi yang berbeda dengan tanaman keras.

Dari berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat beberapa di antaranya bisa jadi terlibat di dalam kegiatan pengusahaan industri perkebunan dengan intensitas yang berbeda. Di perkebunan teh misalnya pemetikan daun teh lebih banyak dilakukan oleh wanita, demikian pula di perkebunan kopi. Untuk jenis tanaman lain seperti tebu, beberapa jenis pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh pria sedangkan beberapa jenis pe-

kerjaan lain biasa dilakukan oleh buruh wanita.

Kecuali dampak langsung terhadap petani dan penduduk di sekitar perusahaan perkebunan terdapat pula dampak tak langsung yaitu timbulnya usaha non-pertanian berupa prosesing hasil pertanian seperti usaha pembuatan makanan serta perdagangan hasil pertanian. Kesempatan kerja yang diciptakan oleh perusahaan perkebunan itu berarti adanya pendapatan tambahan bagi petani dan keluarganya. Meningkatnya daya beli masyarakat di sekitar pabrik memberi peluang bagi munculnya berbagai jenis usaha seperti prosesing hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian dan barang kebutuhan sehari-hari, serta perdagangan kecil lainnya. Dengan demikian perusahaan perkebunan di beberapa daerah pedalaman akan merupakan pusat pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi (Minderewelvaart, 1907). Di beberapa daerah tertentu, seperti Klaten, petani merasa bisa hidup berkecukupan dengan bekerja di pabrik dan menggantungkan upah yang diterimanya sebagai sumber penghidupannya. Mereka tidak melepaskan status tanahnya tetapi memberikan kesempatan menggarap tanah kepada buruh tani yang ada di desanya. Dengan demikian perusahaan perkebunan membuka peluang ekonomi lebih banyak kepada berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat.

3. Perubahan Masyarakat Pedesaan

Industri perkebunan di Hindia Belanda mempunyai kondisi yang berbeda dari apa yang bisa dijumpai di Amerika Latin atau Kepulauan Karibia. Di Hindia Belanda, kecuali di Sumatra Timur dan sedikit di Kabupaten Jember, perusahaan perkebunan mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat di sekitarnya. Apa yang digambarkan oleh Boeke bahwa hubungan antara perusahaan besar dengan perkebunan rakyat sebagai

dualistis ternyata tidak merupakan kenyataan. Dalam banyak kasus, hubungan antara perusahaan besar dan perkebunan rakyat ternyata tidak selalu antagonistik. Implikasi dari keadaan ini sudah barang tentu adalah bahwa dampak yang ditimbulkan oleh ekonomi perkebunan terhadap ekonomi dan masyarakat petani di Jawa berbeda dengan apa yang dijumpai di Amerika Latin atau Kepulauan Karibia.

Bila demikian bagaimanakah ciri dari masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan? Elson menemukan dalam studinya di Pasuruan bahwa peluang ekonomis yang diciptakan oleh perkebunan gula memunculkan tukang grobag sebagai kelompok menengah yang cukup kaya di pedesaan. Mereka adalah pada mulanya petani tetapi karena bisa mengandalkan penghasilan sebagai tukang grobag melepaskan statusnya sebagai petani, yang tak pernah terjadi di daerah tembakau di Klaten.

Dengan kata lain, ciri-ciri masyarakat di daerah perkebunan antara lain bisa dirumuskan seperti berikut:

- a. Matapencaharian di pedesaan menjadi semakin bervariasi, yang pada mulanya sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang dominan kemudian lambat laun sektor non-pertanian menjadi semakin penting.
- b. Hubungan sosial menjadi semakin rumit sebagai akibat tekanan penduduk di satu fihak tetapi di fihak lain tanah yang tersedia harus dibagi untuk pengusahaan tanaman perkebunan dan tanaman pangan maka persyaratan dalam hubungan penyakapan menjadi semakin rumit.
- c. Perusahaan perkebunan dan daerah sekitarnya merupakan pusat pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi dengan daerah lain jaringan transportasi komunikasi mempunyai

peranan penting. Jalan kereta api yang telah dibangun sejak 1870-an di Jawa yang melengkapi jalan militer dan jalan pos yang telah ada memberikan manfaat bukan saja kepada pemodal Belanda tetapi, secara teoretis, penduduk setempat bisa pula menggunakannya. Tetapi banyak laporan mengatakan bahwa penduduk setempat lebih senang menggunakan jalan setapak dalam mengangkut hasil bumi mereka ke pasar karena lebih dekat dan lebih murah.

- d. Masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan lebih terbuka kepada segala sesuatu yang berasal dari luar desa sehingga mereka lebih tanggap terhadap ide-ide modernisasi. Dalam banyak kasus perusahaan perkebunan menunjukkan sebagai tempat yang mudah digerakkan untuk tujuan politik. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya telah menggunakan petani dan buruh perkebunan sebagai pengikut gerakannya.
- e. Daya beli yang menguat menjadikan penduduk di sekitar perusahaan perkebunan sebagai pembeli utama barang-barang import yang didatangkan oleh importir Belanda. Dengan demikian uang yang dibayarkan perusahaan perkebunan bisa diserap kembali oleh pemodal Belanda dengan sistem monopoli dalam penyediaan barang. Ini terjadi di daerah perkebunan yang merupakan *enclave* yang terpisah dari masyarakat sekitar, seperti di Sumatra Timur atau di Sukabumi Selatan.

4. Keresahan Masyarakat Pedesaan

Terlepas dari sederetan dampak positif yang ditimbulkan oleh perusahaan

perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengusahakan tanaman tertentu sering merupakan sumber terjadinya keresahan di kalangan masyarakat pedesaan. Di pedesaan yang terdapat perusahaan perkebunan yang mengusahakan tanaman perdagangan tertentu seperti tebu dan indigo ternyata dite-ngarai lebih banyak menyulut api protes daripada tanaman lain seperti tembakau. (Tulisan tentang situasi di perkebunan tebu lihat misalnya Elson, 1984 dan Knight, 1983; adapun tulisan tentang pedesaan perkebunan tembakau lihat Soegijanto Padmo, 1988). Berkenaan dengan hal itu kita bisa mengajukan pertanyaan seperti faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan pola keresahan atau reaksi masyarakat terhadap perusahaan tanaman perkebunan, siapakah pemimpin atau penggerak protes tersebut, dan bagaimanakah pola gerakan protes yang mereka lakukan?

Sebagaimana dikemukakan di bagian terdahulu bahwa meskipun perusahaan tanaman perdagangan di Daerah Kerajaan seperti tanaman indigo, tebu dan tembakau dilakukan dengan menggunakan lahan sawah dan tenaga petani namun dari aspek organisasi produksi terdapat perbedaan. Dalam tahap produksi, perusahaan tanaman tebu, tembakau dan indigo, tenaga dan lahan petani dan keluarganya diserap sepenuhnya di kebun. Namun dalam tahap prosesing tenaga terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Persewaan tanah petani oleh perusahaan tembakau adalah satu tahun namun umur tanaman tembakau hanya 4 -5 bulan. Selepas itu petani diperkenankan untuk menggarap lahan untuk ditanami padi yang disebut padi *kongsan*. Petani berhak memperoleh separuh dari padi tersebut. Situasi di perkebunan tebu dan indigo adalah jauh berbeda. Petani di perkebunan tebu harus menyerahkan lahannya kepada Pabrik selama sekitar 15 bulan. Tenaga petani, isteri dan anaknya terserap dalam kegiatan produksi tebu

selama 5-6 bulan saja. Selepas itu, penduduk pedesaan tak ada kegiatan lain yang berarti tak ada sumber pendapatan lain karena kegiatan tebang dan angkut dikerjakan oleh sedikit tenaga kerja pria dewasa. Keadaan di perkebunan indigo adalah bahwa petani terlibat bukan saja dalam tahap produksi tetapi juga prosesing. Indigo yang ditanam selepas tanaman padi diproses dalam bak-bak perendaman yang dibangun di sekitar areal tanaman indigo. Tahap prosesing itu menjadi tanggung jawab petani. Para mandor mengawasi dengan ketat setiap pekerjaan di areal indigo tersebut. Intensitas hubungan antara masyarakat pedesaan dengan perusahaan perkebunan merupakan faktor penting pada timbulnya perbedaan reaksi petani di beberapa perkebunan tanaman yang berbeda. Beban yang relatif ringan yang disangga oleh petani di areal tembakau di Karesidenan Surakarta pada abad ke-19 dan awal abad 20 telah menimbulkan dampak sosial-ekonomis yang positif. Di perkebunan tembakau tak pernah ada laporan tentang munculnya protes secara terbuka oleh petani (Lihat Soegijanto Padmo, 1988). Sementara itu di desa tetangga yang merupakan areal tebu dilaporkan telah terjadi protes oleh petani (Ibid.) Petani di areal tebu pada saat menunggu saat tebang yang memakan waktu selama delapan bulan harus mencari sumber matapencaharian di luar sektor pertanian sendiri. Ini sudah barang tentu merupakan saat yang sulit bagi sebagian besar petani. Mereka pada umumnya tak memiliki modal dan ketrampilan untuk melakukan kegiatan di luar sektor pertanian. Oleh karena itu, munculnya tindak kriminal yang tinggi di areal perkebunan merupakan akibat dari keadaan tersebut.

Di samping intensitas hubungan antara petani dengan perusahaan perkebunan terdapat faktor lain bagi munculnya gerakan protes yaitu beban yang semakin berat yang disangga oleh petani. Pada awal abad ke-20 teknik

pengolahan tanah baru yang disebut sistem Reynoso diperkenalkan di perkebunan tebu seperti di perkebunan Kenayan, Maguwo. Sistem Reynoso memerlukan tenaga yang lebih besar dari petani karena lubang yang harus digali lebih dalam dari lubang yang biasanya dikerjakan. Meskipun pekerjaan bertambah berat namun upah yang diberikan oleh pabrik kepada petani tak ditambah. Petani menganggap tindakan perusahaan perkebunan atau pabrik gula itu tidak adil. Namun anehnya, sebagaimana dilaporkan oleh Residen Yogyakarta, tindakan protes petani itu dipimpin oleh sekitar 13 orang *bekel* dari pedesaan di lingkungan perkebunan Kenayan, Maguwo (Lihat "*Kenayan Werstakking*," Agenda 26349, 29 Oktober 1907.) Yang lebih aneh lagi protes petani itu juga dilakukan dengan cara *pepe* di halaman Kepatihan. Mungkin sekali petani atau tepatnya para *bekel* beranggapan bahwa Patih mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan perkebunan sehingga apabila Patih tahu bahwa petani berkeberatan untuk melakukan pekerjaan di kebun tebu, hal itu akan disampaikan juga kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan perkebunan akan mempertimbangkan untuk menaikkan upah atau mengurangi beban pekerjaan.

Satu hal yang menarik adalah bahwa pemimpin gerakan itu adalah tokoh formal yaitu *bekel* yang diakui dan dimanfaatkan oleh pabrik gula dalam melaksanakan kepentingannya. Alasan yang utama dari tampilnya *bekel* untuk menggerakkan petani adalah bukan semata-mata karena mereka ingin membela nasib petani tetapi lebih karena membela kepentingannya sendiri. Sebagaimana diketahui *bekel* adalah penguasa di desa yang pada umumnya memiliki sawah jauh lebih luas dari petani atau *kuli* pada umumnya. Dengan diterapkannya sistem Reynoso maka *bekel* tersebut harus mengeluarkan uang lebih banyak sebagai ongkos bagi buruh tani yang

bekerja untuk *bekel* tersebut. Pola kepemimpinan serupa bisa dijumpai pada gerakan protes petani yang terjadi di berbagai daerah di Jawa pada masa kolonial (Lihat Marwati D. Puspongoro dan Nugroho Notosusanto, 1982/1983: 205-272) maupun pada masa kemerdekaan (Lihat Soegijanto Padmo, 1975.)

Berbagai gerakan protes yang terjadi cukup bervariasi yang berkisar dari gerakan yang bersifat damai seperti *pepe* di halaman Kepatihan seperti Peristiwa Kenayan sampai pada pembakaran kebun tebu dan los pengeringan tembakau. Ada kesan bahwa gerakan protes yang dilakukan petani pada masa kolonial didominasi oleh petani dari pedesaan perkebunan tebu dan indigo, sedangkan di areal tembakau hampir tak terdengar. Namun pada masa kemerdekaan, baik di areal tebu maupun areal tembakau, tak terbebas dari gerakan protes. Hal itu terjadi karena ada ruralisasi politik di Indonesia.

Sejak masa kolonial masyarakat pedesaan telah dilanda pengaruh dari luar baik berupa pengaruh ekonomi uang, budaya akan pentingnya pendidikan, dan yang menyusul pada masa terakhir yaitu pada awal abad ke-20 adalah pengaruh politik. Tokoh Haji Misbach dalam hubungan munculnya berbagai gerakan protes di Surakarta pada masa itu tak bisa diabaikan. Demikian dokter Cipto Mangunkusumo yang sangat membela kepentingan rakyat kecil.

Pengaruh politik pada masyarakat pedesaan, terutama di daerah perkebunan, baru terasa pada dasawarsa 1920-an dan mencapai puncaknya pada masa kemerdekaan. Ini bisa dipahami karena perusahaan perkebunan dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan penderitaan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Sorokin dan Zimmerman (1929:chap.19 dalam Sanders, 1977:135) bahwa gerakan protes petani pada umumnya mempunyai ciri elemental atau terpisah-pisah, tanpa program, dan tak mempunyai tujuan yang jelas.

Tujuan gerakan seperti mengubah struktur penguasaan sumber-sumber yang tercermin dalam program organisasi partai politik secara jelas dapat disaksikan pada masa kemerdekaan. Pada masa kolonial dimana hambatan politis yang ditetapkan oleh penjajah tidak memungkinkan bagi pribumi untuk melaksanakan kegiatan politik secara bebas.

Pada awal masa kemerdekaan, politikus memanfaatkan isu kepentingan rakyat kecil atau petani sebagai modus untuk memperoleh dukungan dari massa rakyat bagi partai politik. Ruralisasi politik yang terjadi pada masa itu telah menempatkan petani pada keadaan yang menguntungkan meskipun bukan tanpa resiko. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang secara vokal menyatakan sebagai pembela kaum miskin dan telah berhasil meyakinkan petani bahwa BTI adalah memihak kaum tani telah membuktikan bahwa ormas itu secara gigih telah membela kepentingan buruh tani. Berbagai aksi sepihak telah dilaksanakan di Klaten untuk merebut kembali tanah yang sudah dijual atau digadaikan pada 1963-64 (Lihat Soegijanto Padmo, 1975.) Sementara itu Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil merekrut pamong desa dan elit desa lainnya dalam kubu mereka. Proses polarisasi di pedesaan yang merupakan dasar persaingan itu dapat dilihat secara jelas dalam tulisan Margo Lyon (1980).

Pada awal dasawarsa 1960-an, tokoh BTI secara gigih memobilisasi petani gurem dan buruh tani untuk menganggang tuan tanah yang notabene adalah anggota atau simpatisan PNI dengan dalih melaksanakan UUPA dan UUPBH. Namun di balik itu sesungguhnya apabila dicermati bahwa tokoh BTI itu sesungguhnya berasal dari kelompok petani kelas menengah. Jadi motif gerakan mereka sesungguhnya bukan untuk memperjuangkan atau membela kepentingan kaum miskin di pedesaan. Tokoh BTI itu menggunakan kekuatan petani miskin untuk membela kepen-

tingan mereka sendiri dalam bersaing pada bidang ekonomi maupun politik melawan kelompok elit pedesaan lain dari kaum nasionalis dan agama. Dari aspek ekonomis, mereka bersaing dalam menguasai sumber-sumber yang ada di pedesaan. Dari aspek politik, mereka bersaing untuk memperoleh dukungan massa rakyat pedesaan dalam membangun pilar politik yang berorientasi di Jakarta.

5. Penutup

Gambaran tentang masyarakat perkebunan di Indonesia merupakan mosaik dan bervariasi, yang tak bisa digeneralisir dalam satu warna. Hal itu disebabkan karena beberapa hal antara lain perbedaan organisasi produksi dan latar belakang sosial-budaya masyarakat setempat. Peluang ekonomis yang terbatas yang diciptakan oleh perusahaan perkebunan serta beban yang berat yang harus disangga oleh petani merupakan beberapa sebab bagi timbulnya keresahan di pedesaan. Pertanyaan yang bisa diajukan barangkali mengapa di daerah non-perkebunan yang peluang ekonomisnya terbatas tak terdengar ada gerakan protes? Jawabnya mungkin adalah bahwa di daerah non-perkebunan pola hubungan tradisional-patron-klien yang telah terjalin selama beberapa generasi, meskipun seringkali memang juga berat tak dianggap sebagai beban. Karena itu telah menjadi dunia mereka, menjadi jalan hidup mereka. Bangsawan memang berhak memerintah petani dan petani memang telah ditakdirkan sebagai pelayan bagi bangsawan. Petani mengabdikan memberikan persembahan, bangsawan menerima persembahan dan memberikan perlindungan. Namun manakala posisi bangsawan itu digantikan oleh perusahaan perkebunan dimana modal dan manajerial asing menggantikan sistem *maro* dalam sistem *apanage* maka secara kultural petani Jawa tak bisa menerimanya. Sikap tak bisa menerima itu tetap

terendam dalam hati mereka dan barulah setelah ada fasilitator seperti para *bekel* di Kenayan pada 1904 dan para tokoh BTI pada 1960-an ketidakpuasan petani itu tersalurkan.

Berbeda dengan pada masa kolonial, pada masa kemerdekaan, pola hubungan antara perusahaan perkebunan dengan petani tak lagi ada perbedaan. Tanaman tembakau dianggap oleh tokoh partai politik tak berbeda dengan tanaman perkebunan lain seperti tebu dan indigo yaitu sebagai sumber penderitaan bagi petani. Oleh karena itu peranan penggerak dalam gerakan protes menjadi penting. Siapakah sesungguhnya yang muncul sebagai penggerak? Jawabnya adalah mereka yang terganggu kepentingannya, yaitu kelompok menengah masyarakat pedesaan. Peranan tokoh religius tak terlihat di dalam gerakan protes di Surakarta kecuali seorang Haji yang pro-komunis. Penggunaan lambang-lambang dalam persiapan atau di saat meletusnya gerakan juga tak dijumpai.

Pemimpin gerakan protes di pedesaan yang oleh beberapa ahli ilmu-sosial dianggap sebagai pahlawan kaum miskin dan menyebut dirinya sebagai pembela kaum tani sering dianggap cukup penting dalam proses pendidikan politik di pedesaan. Dihapuskannya DPRKGR setelah 1965 oleh sementara pihak dianggap sebagai kemunduran. Ditambah lagi batasan bagi partai politik untuk membangun basis sampai pada tingkat kabupaten bukan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan, oleh para ahli justru bisa disebut sebagai depolitisasi masyarakat pedesaan.

Daftar Pustaka

- Allen, G.C. and A.G. Donnithorne, 1957. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A Study in Economic Development*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Barlow, Colin, 1984. "A Comparison of Factors Influencing Agricultural Development in Malaya and Indonesia, 1870-1940." Paper prepared for the

- Conference on "Economic Growth and Social Change in Indonesia, 1820-1940", Rijksuniversiteit, Groningen, September 12-14.
- Fernando, R.M., 1982. *"Peasants and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residentie From the Cultivation System to the End of the First Decade of the Twentieth Century."* Tak Diterbitkan Ph.D. thesis, Monash University.
- Geertz, C., 1963. *Agricultural Involution: the Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- "Kenayan Werkstakking", Agenda 26349, 29 Oktober 1907.
- Knight, G.R., 1983. *"The Peasantry and The Cultivation of Sugar Cane in Nineteenth Century Java. A Study of Pekalongan Residency, 1830-1870."* Paper for presentation to Colonial Period, ANU, December 16-18.
- Lyon, Margo, 1980. *"Basis Conflict in Rural Java."* Cornell UP.
- Marwati D. Pusponogoro dan Nugroho Noto-susanto, 1982/1983. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV. Jakarta:Departemen P dan K.
- O'Malley, W.J., 1977. *"Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Yogyakarta in 1930's."* Tak Diterbitkan Ph.D. thesis, Cornell University.
- Pelzer, K.J., 1978. *Planters and Peasant. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.*
- Sanders, T. Irwin, 1977. *Rural Society*. Prentice-Hall.
- Soegijanto Padmo, 1975. *"Landreform dan Gerakan Protes Petani Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah: 1959-1965"* Skripsi Sarjana, Fakultas sastra UGM
- , 1988. *"The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Its Impact of the Peasants' Economy and Society."* Ph.D. Thesis The Australian National University, Canberra.
- The Kian-wie, 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social Research.